



**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJIP )  
TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH**

Jl. Hasyim Banta Muda No.1 Gp. Mulia  
Banda Aceh

BANDA ACEH TUNGGAL IKA

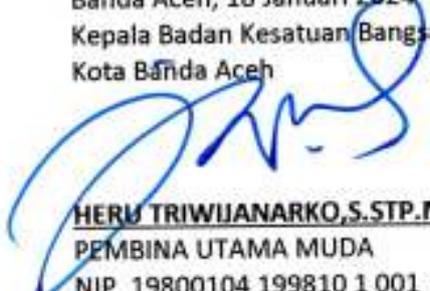
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2023. Sebagai pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya diwilayah Kota Banda Aceh dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik. .

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2023.

Banda Aceh, 18 Januari 2024  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Banda Aceh



**HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19800104 199810 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2023 merupakan instrument pertanggung jawaban dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh selama menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah, yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab yang menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesatuan bangsa, dan politik.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kota Banda Aceh dalam upaya mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam rangka memperkuat **NKRI** dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Banda Aceh, 18 Januari 2024  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Banda Aceh

  
**HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19800104 199810 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Aspek Strategi Organisasi .....	2
1.2. Isu –Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
2.1. Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh .....	11
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2021 .....	16
2.3. Perjanjian Kinerja .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	29
3.1. Capaian Kinerja .....	29
3.2. Analisis Penyebab Peningkatan dan Penurunan kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Direncanakan.....	45
3.3. Realisasi Anggaran.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	56
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
1. Rencana Strategik (Formulir RS)	
2. Perjanjian Kerja	
3. Rencana Kinerja Tahunan ( Formulir RKT )	
4. Pengukuran Kinerja ( Formulir PK)	

## PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai salah satu SKPK Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara eksplisit tercantum dalam RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027 dan secara implicit kedudukan Badan Kesbangpol untuk penyelenggaraan program Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan dalam RPJMD.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat mutlak bagi setiap Instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi

Semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan, telah menumbuhkan kembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam era desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut lebih responsif melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah. Oleh Karena itu pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan.

Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai media pelaporan kinerja tahunan pemerintah daerah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, merupakan LAKIP tahun ke dua dari Renstra tahun 2023-2026, dan sekaligus menjadi penilaian atas capaian kinerja selama 1 (satu) tahun.

Uraian LAKIP ini terdiri dari penetapan indikator kinerja sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh periode 2023-2026 yang telah mendapat dukungan pembiayaan dari APBK pada tahun 2022 serta menganalisa capaian kinerja pada tahun 2023 pada tingkat sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh periode 2023-2026.

### **1.1. Aspek Strategis Organisasi**

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

### **1.1.1. Susunan Organisasi**

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat
  - c. Kasubag Umum Kepegawaian Dan Aset
  - d. Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah;
  - e. Perencana Ahli Muda
- (2) Kabid Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
  - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan ;
  - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pembinaan Karakter Bangsa
- (3) Kabid Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
  - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengembangan Budaya Dan Etika Politik;
  - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Fasilitas Partai Politik Dan Pemilu.
- (4) Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Ormas, terdiri dari :
  - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya; dan
  - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda organisasi Masyarakat.
- (5) Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
  - a. Analisis Ahli Muda Penanganan Konflik; dan
  - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi, Informasi

### **1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1.1.2.1 Tugas Pokok**

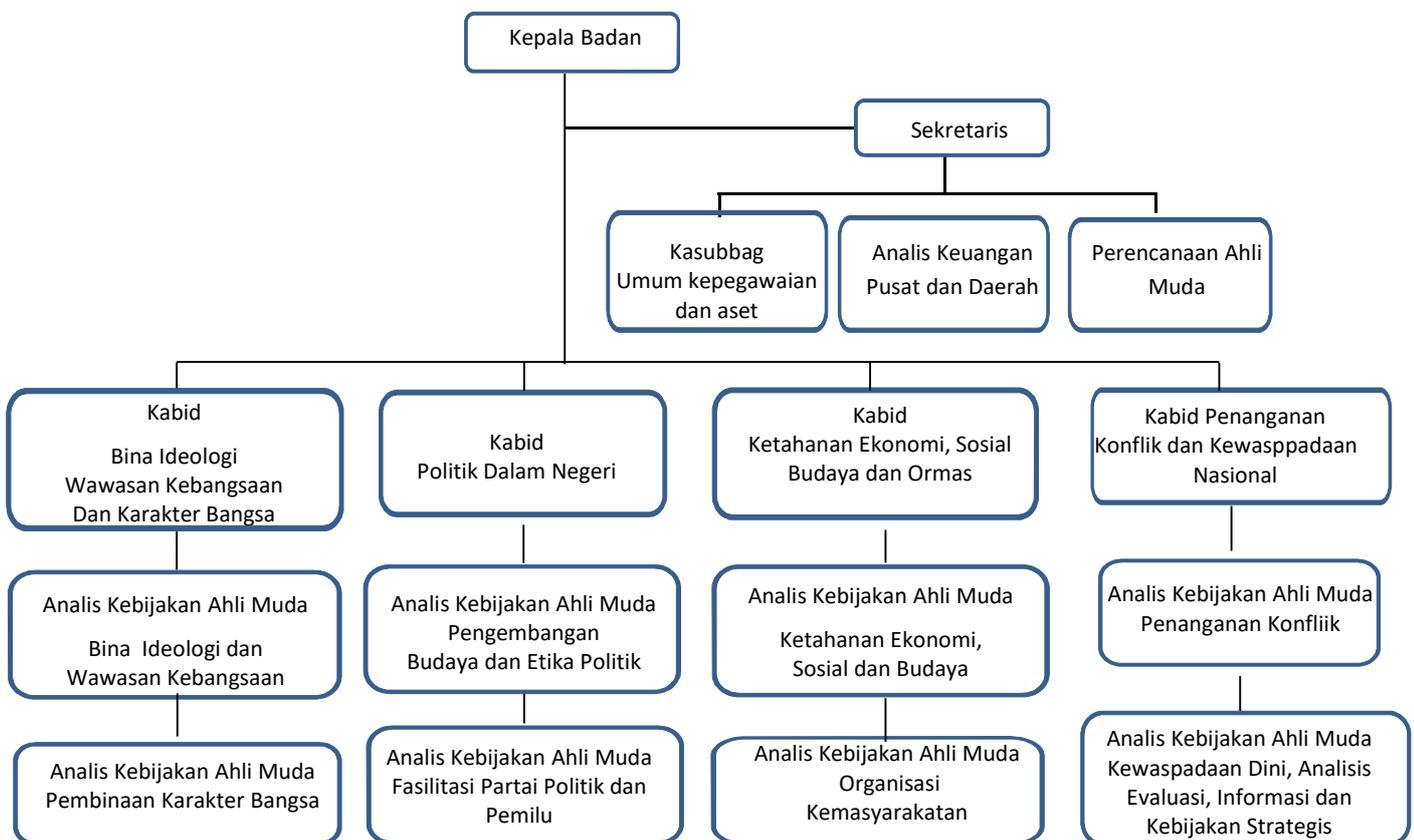
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dibentuk Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas Membantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 1.1.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Badan.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Urusan Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional;
- c. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional;
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Kesekretariatan;
- f. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan

**Tabel 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**



### 1.1.3. Sumber Daya

Pada akhir tahun 2023 jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebanyak 31 orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH		JUMLAH (ORANG)	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	3	1	4	
3	IV/a	4	3	7	
4	III/d	6	7	13	
5	III/c	-	-	-	
6	III/b	-	1	1	
7	III/a	-	-	-	
8	II/d	1	2	3	
9	II/c	-	-	-	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	-	-	-	
12	I/c	-	-	-	
	Jumlah PNS	15	14	29	
	Non PNS				
13	Tenaga Kontrak	4	2	6	
	Jumlah Non PNS	4	2	6	
	JML PNS + NON PNS	19	16	35	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat distribusi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan golongan terbesar pada golongan III/d sebanyak 11 orang. Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berstatus PNS dan Tenaga Kontrak.

**Tabel 1.3**  
**JUMLAH PEGAWAI BADAN KESBANGPOL BERDASARKAN JABATAN/ESELONERING**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah orang</b>
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasubbag	1
5	Jabfung Perencana Ahli Muda	1
6	Jabfung Analis Keuangan Pusat Dan Daerah	1
7	Analis Kebijakan Ahli Muda	6
8	Analis Keamanan	1
9	Analis Ketahanan Budaya	1
10	Analis Sosial Budaya	1
11	Analis Perencana, Evaluasi Dan Pelaporan	1
12	Analis partai Politik	1
13	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1
14	Pengelola pemantau	1
15	Pengelola Kepegawaian	1
1b	Pengolah Data	1
17	Pengelola Darang Milik Negara	1
18	Rendahara	1
19	Pengadmistrasian Persuratan	1
20	Pengadmistrasian Keuangan	1
21	Pengadministrasian Sarana Dan Prasarana	1
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa masih ada 2 (dua) orang pada jabatan fungsional penyetaraan yang masih kosong. Adapun jabatan fungsional penyetaraan yg kosong adalah Jabfung pada Analis Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S3	1
2	S 2	3
3	S 1	22
4	D III	-
5	SLTA	3
6	SLTP	-
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.;

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang inventaris dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK Banda Aceh dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar Tabel berikut :

**TABEL 1.5**  
**REKAPITULASI PERLENGKAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	2 unit
3.	Peralatan dan Mesin	108 unit
5.	Jaringan	- unit
6.	Aset tetap lainnya	- unit

## **1.2. Isu - Isu Strategis**

### **1.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai pelaksana tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pelaksanaan tugas
3. Belum akuratnya kualitas analisa data dan informasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut;

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas.
2. Masih Kurangnya pemahaman Aparatur tentang TUPOKSI dalam pelaksanaan tugas
3. Belum optimalnya pola koordinasi antar SKPD ,Instansi dan Lembaga terkait.
4. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

### **1.2.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh.**

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol dan Renstra Kota Banda Aceh terdapat beberapa faktor penghambatan dan faktor pendorong

Adapun hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan, pendanaan dan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap koordinasi, hambatan yang sering muncul adalah adanya hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi. Untuk mengatasinya dilakukan prosedur standar yaitu melalui evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya prioritas dalam mengatasinya beserta jadwal waktu dalam menanganinya.
- b. Pada sebuah sistem kerja secara utuh maka faktor SDM sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Belum berkembangnya SDM dalam sebuah tim kerja akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan. Darisisi ini, upaya dalam menangani hambatan yang muncul adalah dengan mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-cara baru yang lebih efektif/efisien.
- c. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada setiap program atau kegiatan.

Sedangkan peluang yang menunjang program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh antara lain;

- 1) Adanya dukungan dari Pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Adanya partisipasi Masyarakat dalam menjaga kantrantibmas .
- 3) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi baik dari pusat maupun daerah.
- 4) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 5) Tersedianya aparatur memadai.

### **1.2.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam mewujudkan Kantrantibmas yang berwawasan kebangsaan dan kerukunan beragama ditengah-tengah masyarakat, Badan Kesbangpol dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

- a) Tergerusnya Toleransi Pada Pemilu 2024
- b) Perlunya Optimalisasi Wawasan Kebangsaan
- c) Perlunya Optimalisasi Pendidikan Politik
- d) Pemahaman Demokrasi Yang Berlebihan

- e) Penataan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

### **1.2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

#### **1.2.5.1. Peluang**

- 1) Adanya dukungan dari Pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Adanya partisipasi Masyarakat dalam menjaga kantrantibmas.
- 3) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi baik dari pusat maupun daerah.
- 4) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 5) Tersedianya aparatur memadai.
- 6) Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung

#### **1.2.5.2. Tantangan**

- 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- 2) Lemahnya basis data menyebabkan validitas data belum optimal.
- 3) Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.
- 4) Kemajuan teknologi informasi dan tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan kelembagaan daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.
- 5) Rendahnya dukungan keuangan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga belum dapat berjalan secara optimal.
- 6) Lemahnya Koordinasi antara SKPD dan Lembaga terkait

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pasal 6 ayat 2 disebutkan SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi misi organisasi. Substansi perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan hasil secara terukur.

### **2.1. RENCANA STRATEGIS WALAHU KEBAHUAN BANGSA DAN POKTIR KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2025**

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong

harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka **Visi** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2003-2026 adalah;

**“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG KONDUSIF, DEMOKRATIS, TENTRAM DAN DAMAI DALAM BINGKAI SYARIAT ISLAM”.**

Yaitu menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan serta keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani ikon disaat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemahaman terhadap ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, rasa kesadaran bela Negara dan cinta tanah air untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan dukungan stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya, beragama dan organisasi kemasyarakatan yang sejahtera dengan menjunjung nilai-nilai kebhinekaan, toleransi dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Meningkatkan Pemahaman budaya politik yang demokratis dan membangun kemitraan kelembagaan politik yang harmonis.
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta penanganan konflik yang memberikan dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memelihara sinergitas dan harmonisasi koordinasi dibidang intelijen daerah terhadap kerawanan social serta perlintasan dan pergerakan orang asing, tenaga kerja asing dan ormas asing.

6. Mewujudkan peran lembaga penggerak keagamaan dan lembaga penggerak kemasyarakatan lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik.

### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

#### **2.1.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi dapat dilihat pada table berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja
2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi dan lembaga lain dalam rangka memantapkan dan memelihara keamanan dan kenyamanan
3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan dibidang Politik dan organisasi kemasyarakatan

#### **2.1.1.2. Sasaran**

1. Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan professional
2. Peningkatan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat
3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya Minuman keras dan narkoba
4. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama
5. Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wawasan kebangsaan
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik
7. Pelaksanaan pemilu/pilkada damai

## INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	LSM, Ormas dan OKP terdaftar	95	174	219	259	299	339	339
2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial	220	220	220	220	220	220	220
3	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miuman Keras dan Narkoba	60	10	10	10	10	10	10
5	Jumlah LSM	15	15	15	15	15	15	15

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

Tujuan 1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KONDISI AKHIR (2026)
				2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.	Indeks Ketentraman Umum	74.61	74.63	74.64	75.08	75.09
		Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	-	-	73.79%	-	-
		Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang Aktif	49.21%	49.25%	50.13%	50.15%	50.17%

SASARAN		PROGRAM	
1	2	3	
1	Capain Tingkat Penangan Konflik Sosial	1.1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		1.2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		1.3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
2	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Dan Pilkada	2.1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3	Persentase Ormas, OKP, Dan LSM Yang Aktif	3,1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

### 2.1.2. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui keikut sertaan dalam diklat teknis, diklat kepemimpinan, dan diklat fungsional.
2. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya.
3. Membangun kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, kesadaran berpolitik, ketertiban dan keamanan lingkungan menuju Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan.

### **2.1.3. Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Arah kebijakan Badan Kesbangpol tahun 2023-2026

1. Mengikut sertakan aparatur pada kegiatan bimtek dan diklat-diklat
2. Melaksanakan Pembinaan Ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. Melaksanakan pembinaan Politik dan organisasi kemasyarakatan
4. Melaksanakan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan umat beragama.
5. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama dengan instansi terkait.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua pelaksanaan kegiatan

### **2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2023**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renja tahun 2023 ditetapkan pada awal tahun 2023, yang memuat target kinerja atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai berikut:

TABEL 2.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemanjapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</i>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</i>	<i>Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</i>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tersedianya data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Fvaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Fvaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
<i>Perumusan Kebijakan teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

### **2.3. Perjanjian Kinerja**

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 9 disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang akan dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan reward and punishment.

Penyusunan perjanjian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbang Pol Kota Banda Aceh periode 2023-2026 dan memperhatikan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2023 sebesar Rp.11.485.061.905,- setelah terjadi Perubahan anggaran maka Anggaran untuk badan Kesbangpol menjadi sebesar Rp. 19.877.635.767,-

Target Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Sasaran strategis dan target indikator kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tahun 2023 ditetapkan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada Januari 2023, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Sasaran Strategis :**

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya Tata Kelola Adminitrasi Perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Pelaporan dan Penatausahaan Aset	1.	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Badan Kesbangpol yang dilaporkan tepat waktu	100 %
	2.	Persentase Laporan Keuangan yang dilaporkan tepat waktu	100 %
	3.	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai pada Badan Kesbangpol	98 %
	4.	Predikat hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	B
	5.	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	75 %

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program, 5 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			%
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.290.857.483	4.188.603.654	102.253.829	68,47
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	9.131.730	312.000	8.819.730	3,42
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.131.730	312.000	8.819.730	3,42
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.808.578.343	3.791.708.297	16.870.046	99,56
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.587.778.343	3.577.683.297	10.095.046	99,72
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.800.000	214.025.000	6.775.000	96,93
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	302.311.610	273.754.489	28.557.121	90,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.562.000	1.562.000	-	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.086.000	-	22.086.000	- ,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.112.950	8.435.495	5.677.455	59,77
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.550.660	263.756.994	793.666	99,70
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	129.018.800	89.646.168	39.372.632	69,48
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.725.800	34.207.168	19.518.632	63,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.293.000	55.439.000	19.854.000	73,63
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	41.817.000	33.182.700	8.634.300	79,35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.790.000	28.333.700	4.456.300	86,41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.027.000	4.849.000	4.178.000	53,72

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran	Indikator Kinerja		
	No	Uraian	Target
Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	1.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang
	2.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang
	3.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang
	4.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang
	5.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan
	5.	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang
	7.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang
	8.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 laporan
	9.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 1,diarahkan melalui pelaksanaan program

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			%
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	139.520.000	35.262.375	104.257.625	25,27
<i>Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	139.520.000	35.262.375	104.257.625	25,27
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	139.520.000	35.262.375	104.257.625	25,27
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.229.870.000	1.147.120.000	82.750.000	93,27
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.229.870.000	1.147.120.000	82.750.000	93,27
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	882.620.000	880.870.000	1.750.000	99,80
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	347.250.000	266.250.000	81.000.000	76,67

**Sasaran Strategis 2 :**

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Dan Pilkada		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 2, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			%
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	14.239.474.284	2.916.560.000	11.322.914.284	20,48
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</i>	14.239.474.284	2.916.560.000	11.322.914.284	20,48
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	14.239.474.284	2.916.560.000	11.322.914.284	20,48

**Sasaran Strategis 3 :**

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Persentase Ormas, OKP, Dan LSM Yang Aktif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan

Untuk sasaran strategis 3, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp.29.614.705,- namun setelah terjadi rasionalisasi anggaran Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ditiadakan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2023 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tolak ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dapat diukur dari beberapa unsur yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Penetapan Kinerja (TAPKIN), rencana kerja tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja (PK) Badan Kesbangpol Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tahun 2023-2024. Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome.

Tahun 2023, implementasi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Rencana Strategis sebanyak 6 program dan 40 kegiatan dan yang tertampung dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebanyak 4 program dengan 8 kegiatan serta 15 sub kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja (pada form PK) sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol tahun anggaran 2023 telah tercapai.

**TABEL 3.1**  
**TABEL REALISASI KINERJA**  
**BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023**

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian (%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	60%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan	20 Laporan	20 Laporan	100%

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian (%)
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	1 Unit	33%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100%
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>				
<i>Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		0%

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian (%)
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>				
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>				
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	0	0,0%
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik</b>				
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	100 Orang	100 Orang	100%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%

Badan Kesbangpol perlu melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang berkesinambungan dengan Visi dan Misi Kota Banda Aceh guna terwujudnya Kota Banda Aceh yang maju dan kondusif dalam bingkai Syariah. Adanya indikator diperlukan sebagai tujuan atau hasil yang akan dicapai pada program maupun kegiatan yang telah disusun. Pada LKPJ Badan Kesbangpol Tahun 2023, akan dipaparkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran yang telah disusun sebelumnya. Capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran yang dipaparkan pada LKJIP berdasarkan laporan fisik yang telah dihimpun setiap bulannya.

Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan di atas, maka dari 6 program yang direncanakan pada awal tahun anggaran maka yg dapat terakomodir pada DPPA Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebesar 4 Program. Dalam hal capaian kinerja yang seharusnya dapat terealisasi 100 % namun hingga akhir tahun anggaran SPD tidak dikeluarkan maka ada beberapa kegiatan yang tak dapat terealisasikan.

**TABEL 3.2**  
**TABEL PERBANDINGAN PERSENTASI REALISASI KINERJA**  
**TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023**

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2022		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun</i>	100	%	<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun</i>	100	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	100	%	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	100	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	1	Tahun
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Persantoran Yang disediakan	12	Bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Persantoran Yang disediakan	1	Tahun
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum</i>	100	%	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum</i>	100	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan	20	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan	20	Laporan

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2022		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023	
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	%	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100	%	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1	Unit	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	0	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	2	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	Unit

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2022		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	%
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2022		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30	%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0	%
Perumusan Kebijakan Dihidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30	%	Perumusan Kebijakan Dihidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0	%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Orang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Orang
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Laporan	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	Laporan

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2022		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	%	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tersedianya Data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	0	%	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	0	%
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	0	Orang	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	0	Orang
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	0	%	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	0	%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	Orang	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	0
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	Orang	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	Orang
Pelaksanaan Monitoring di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	Orang	Pelaksanaan Monitoring di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	0

Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2022		Program / Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100	%	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100	%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Dokumen	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Laporan
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan

Pada tabel 3.2 di atas, dipaparkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan tahun 2023.

Pada tahun 2023 Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasikan karena kegiatan-kegiatan tersebut mengalami Rasionalisasi anggaran sehingga ada anggaran yang tidak dapat dilaksanakan.

**TABEL 3.3**  
**TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023**  
**DENGAN REALISASI RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023**

KATEGORI PERANGKAT	INDIKATOR	PENCAPAIAN PERANGKAT DAERAH	
		PERANGKAT 2023	PERANGKAT 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun</i>	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan	1 Tahun
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Yang disediakan	12 Bulan	1 Tahun
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum</i>	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan	20 Laporan	20 Laporan
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12Bulan	12Bulan

KEMERDEKAAN EKSPANSI	INDIKATOR	PENCAPAIAN HASIL KEGIATAN DAERAH	
		2022	2023
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5 Unit
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	0%
<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	85%	0%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	0
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	0

KONTRIBUSI/PEFAKTAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN/STASUS: SETELAH DIBERHAR	
		SEBELUM DIBERHAR	PRAKTIK/2022
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90%	0%
<i>Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	90%	0%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	0
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	0
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 laporan	0
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Tersedianya Data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	0%	0%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	0%	0%
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	0

KEMERDEKAAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN TERHADAP TARGET DAN CAPAIAN	
		RENCANA	REALISASI
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	0,0%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	0,0%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Kegiatan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	100 Orang	0
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	0
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	0

KEMERDEKAAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN HASIL KEGIATAN	
		RENCANA	AKTUAL
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	33%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100%	33%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	0
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	2 Laporan

Pada tabel 3.3 di atas, dipaparkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan dokumen Renstra tahun 2023. Beberapa kegiatan pada tahun 2023 tidak mencapai target yang direncanakan pada Renstra namun secara keseluruhan, kegiatan yang terdapat pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak mencapai target yang ditetapkan di Tahun 2023 dan Tahun 2023.

### **3.2. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN DAN PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DIRENCANAKAN**

#### **a. Permasalahan**

Dalam memenuhi target capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan masih menghadapi berbagai hambatan/kendala antara lain;

1. Masih rendahnya SDM pegawai yang dalam memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimiliki
2. Keterbatasan sumber daya aparatur yang menguasai IT
3. Belum memadainya anggaran baik untuk pemeliharaan peralatan kantor maupun kegiatan lainnya, sehingga peralatan kantor yang rusak berat tidak bisa dilakukan perbaikan dan kegiatan-kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Masih lemahnya pemahaman Lembaga/Institusi/SKPD lainnya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol.
5. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD

#### **b. Strategi Pemecahan Masalah**

Dengan dijumpainya beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya untuk strategi pemecahan masalah tersebut sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan yang bermasalah tersebut akan kembali berjalan lancar. Adapun Strategi pemecahan masalah tersebut antara lain;

1. Adanya penambahan pegawai yang memiliki SDM yang handal dalam bidang IT.
2. Berharap kepada Walikota dan DPRK dapat mengalokasikan dana yang memadai untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak baik ringan maupun berat agar dapat terlaksananya program yang telah ditetapkan.
3. Adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna memenuhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga /Institusi / SKPD lainnya agar lebih memahami terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Meningkatkan koordinasi antar SKPD

Hasil dari berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja. Pada tahun 2023, pendanaan yang diterima oleh setiap program atau kegiatan yang terdapat dalam program-program pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh mengalami perubahan. Di bawah ini akan dipaparkan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap programnya :

**TABEL KE-10.10 PERUBAHAN YANG MENYALAKAN PERUBAHAN ANGGARAN  
MELAKUKI RESKALIBRASI BUDGET DAN POLITIK KEBERUSAHAAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.306.480	9.131.730	-22.174.750
<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	31.306.480	9.131.730	-22.174.750
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.306.480	9.131.730	-22.174.750
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.652.023.950	3.587.778.343	-64.245.617
Perediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.652.023.950	3.587.778.343	-64.245.617
Perediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.500.000	220.800.000	300.000
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	224.287.990	273.754.489	49.466.499
Perediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.562.000	1.562.000	-
Perediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
Perediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.725.990	8.435.495	-11.290.495
Peryelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.000.000	263.755.994	60.756.994

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	150.104.800	89.646.168	-40.940.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.725.800	34.207.168	-19.518.632
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.379.000	55.439.000	-40.940.000
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	39.340.000	33.182.700	-6.157.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.790.000	28.333.700	-4.456.300
pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.550.000	4.849.000	-1.701.000
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	79.799.415	-	-79.799.415
<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	79.799.415	-	-79.799.415
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	64.489.700	-	-64.489.700
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.309.715	-	-15.309.715

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.226.690.360	2.916.560.000	-2.212.991.400
<i>Perumusan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	5.226.690.360	2.916.560.000	-2.212.991.400
Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.045.880.900	2.916.560.000	-2.129.320.900
Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	83.670.500	-	-83.670.500
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	97.138.960	-	-97.138.960

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	29.614.705	-	-24.624.505

PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	1.492.674.425	1.147.120.000	-345.554.425
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</i>	1.492.674.425	1.147.120.000	-345.554.425
Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	933.885.000	880.870.000	-53.015.000
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	49.572.940	-	-49.572.940
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	58.416.500	-	-58.416.500
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	450.799.985	266.250.000	-184.549.985

Ada dua puluh tiga Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 yang mengalami perubahan anggaran, dan sebanyak 21 sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, hal ini dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Selain itu ada Satu sub kegiatan mengalami penghapusan anggaran, yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Selebihnya mengalami pengurangan.

Sedangkan kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang dipaparkan pada tabel 3.4 di atas tidak mengalami perubahan anggaran. Selanjutnya akan dipaparkan kegiatan atau program dalam capaian realisasi anggaran.

**TABEL REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			%
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>19.899.721.767</b>	<b>8.287.546.029</b>	<b>11.612.175.738</b>	<b>41,65</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.290.857.483</b>	<b>4.188.603.654</b>	<b>102.253.829</b>	<b>68,47</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>9.131.730</i>	<i>312.000</i>	<i>8.819.730</i>	<i>3,42</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.131.730	312.000	8.819.730	3,42
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.808.578.343</i>	<i>3.791.708.297</i>	<i>16.870.046</i>	<i>99,56</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.587.778.343	3.577.683.297	10.095.046	99,72
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.800.000	214.025.000	6.775.000	96,93

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			%
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	302.311.610	273.754.489	28.557.121	90,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.562.000	1.562.000	-	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.085.000	-	22.085.000	- ,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.112.950	8.435.495	5.677.455	59,77
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.550.660	263.756.994	793.666	99,70
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	129.018.800	89.546.168	39.372.632	69,48
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.725.800	34.207.168	19.518.632	63,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.293.000	55.439.000	19.854.000	73,63
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	41.817.000	33.182.700	8.634.300	79,35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.790.000	28.333.700	4.456.300	86,41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9.027.000	4.849.000	4.178.000	53,72

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			%
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	14.239.474.284	2.916.560.000	11.322.914.284	20,48
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</i>	14.239.474.284	2.916.560.000	11.322.914.284	20,48
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	14.239.474.284	2.916.560.000	11.322.914.284	20,48
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	139.520.000	35.262.375	104.257.625	25,27
<i>Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	139.520.000	35.262.375	104.257.625	25,27
Pelaksanaan Kordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	139.520.000	35.262.375	104.257.625	25,27

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp)			%
	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.229.870.000	1.147.120.000	82.750.000	93,27
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>1.229.870.000</i>	<i>1.147.120.000</i>	<i>82.750.000</i>	<i>93,27</i>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	882.620.000	880.870.000	1.750.000	99,80
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	347.250.000	266.250.000	81.000.000	76,67

Dalam segi anggaran, pencapaian realisasi anggaran ke empat program yang dimiliki Badan Kesbangpol pada tahun 2023 mencapai 41.65%. Hal ini disebabkan tidak keluarnya SPD sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan laporan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh.

Pedoman penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2023 memuat laporan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Dalam pelaksanaan kinerja terdapat berbagai kendala yang dihadapi mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain aparatur masih ada yang belum memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimilikinya, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, sehingga dapat dikatakan pencapaian sasaran dengan ukuran seperti angka – angka tersebut diatas cukup memberikan kebanggaan kepada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2023 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan ditahun mendatang sangat kami harapkan.

Oleh karena itu penyempurnaan strategi dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan menyempurnakan mekanisme perencanaan diharapkan penyusunan rencana kinerja tahunan melalui berbagai program dan kegiatan benar-benar dapat terlaksana, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai semaksimal mungkin.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Banda Aceh, 20 Januari 2023  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Banda Aceh



**HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19800104 199810 1 001